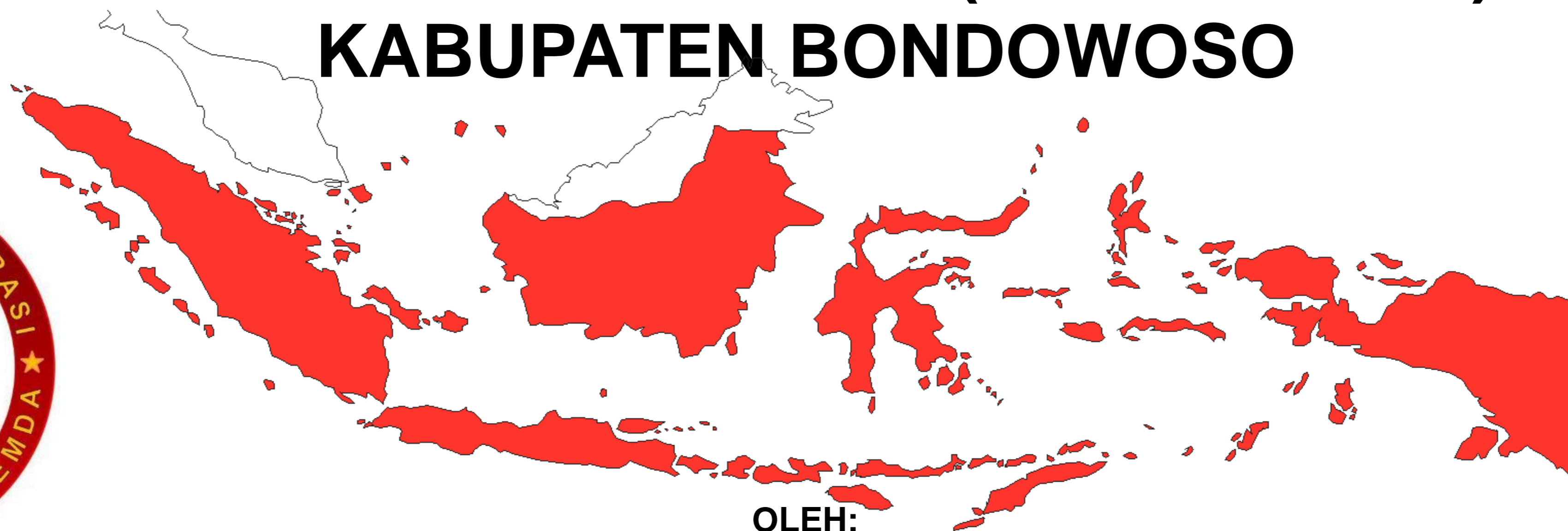




PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH (PPRB PEMDA) KABUPATEN BONDOWOSO



OLEH:

Dr. BUDI UTOMO, S.IP., M.Si.

**KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI PADA BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI**

BONDOWOSO, 19 NOVEMBER 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb

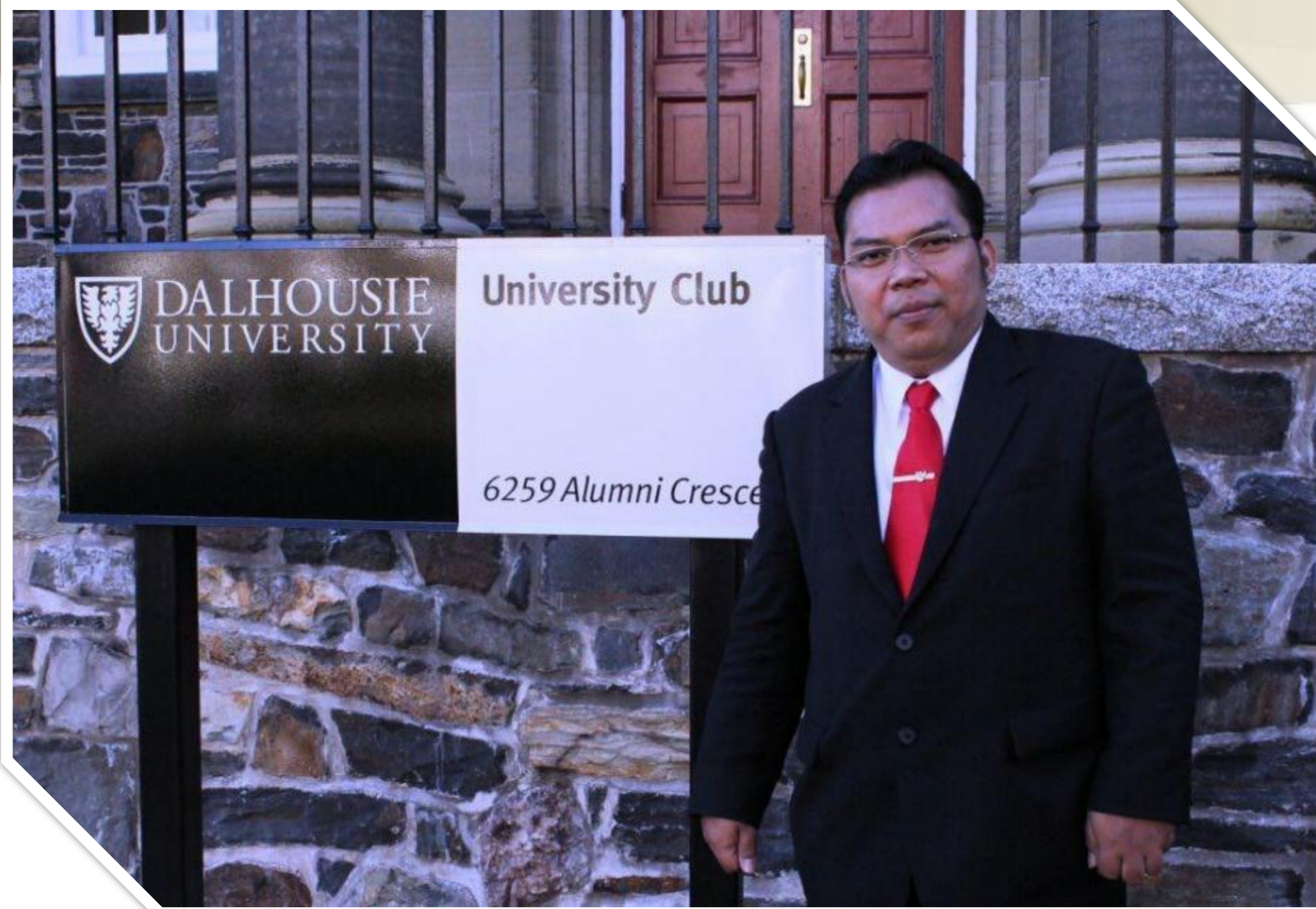


@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id

CURRICULUM VITAE



Nama	:	Dr. BUDI UTOMO, S.IP., M.Si.
TTL	:	Lampung Selatan, 8 Juni 1979
Jabatan	:	Kepala Bagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi
Instansi	:	Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta
Pendidikan	:	Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung Department of Political Science Faculty of Arts and Social Sciences Dalhousie University Marion McCain Arts and Social Sciences Building Halifax, Nova Scotia, Canada
Riwayat Pekerjaan	:	1. Dosen FISIP Unpad, Bandung; 2. Dosen Non Organik SESKOAD, Bandung;
Kontak	:	E-mail: budiutomo79@gmail.com HP dan WA: 0812 2040 8866



MARI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI



A. PENGANTAR



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



VISI DAN MISI KABUPATEN BONDOWOSO 2018-2023



Bupati Bondowoso
K.H. Salwa Arifin



Wakil Bupati Bondowoso
H. Irwan B. Rachmat



“Membawa Bondowoso MELESAT dalam Bingkai Iman dan Takwa” (Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil dan Terdepan)”



1. Membangun Kemandirian Ekonomi Bondowoso dengan Memperkuat Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta Sektor lainnya dengan Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan maupun Lapangan Kerja;
2. Melestarikan Lingkungan Agar Budaya Guna Tinggi Sebagai Keuntungan Kompetitif Bondowoso, dan digunakan sebaik-baiknya untuk Kesejahteraan Bersama;
3. Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Kebijakan Sosial di Tingkat Kabupaten yang Sinergi dengan Kebijakan Provinsi maupun Nasional;
4. **Menghadirkan Pemerintahan yang Demokratis melalui Kepemimpinan yang Jujur, Adil, Amanah, Partisipatif, dan Inovatif;**
5. Mewujudkan Bondowoso yang terdepan, Bermartabat dan Berkarakter Unggul dan Kompetitif.

DENGAN 5 PROGRAM PRIORITAS:

1. **Percepatan Reformasi Birokrasi yang Berbasis Keterbukaan Informasi Publik dan Partisipatif;**
2. Membangun Sinergitas Vertikal dan Horisontal dalam Pembangunan untuk Kesejahteraan;
3. Mengoptimalkan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Sektor Pariwisata yang Religius dan Ramah Lingkungan;
4. Percepatan Investasi Daerah dan Penguatan UKM sebagai Penopang Ekonomi Rakyat;
5. Optimalisasi Pendidikan Karakter Melalui Penguatan Pondok Pesantren serta Pendidikan Non Formal yang disinergikan dengan Pendidikan Formal sebagai Pilar Pembangunan Bondowoso berdasarkan Iman dan Takwa.





VISI DAN MISI PROVINSI JAWA TIMUR 2019-2024



Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa



Wakil Gubernur Jatim
Emil Dardak

V

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Sejahtera, Seimbang, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan Partisipatoris, Inklusif dan Menghargai Nilai-nilai Manusia”

M

1. Membangun insan Jawa Timur secara utuh dengan mendayagunakan seluruh potensi melalui pembangunan sektor kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dengan dilandasi oleh kearifan local yang berbasis pada nilai-nilai kesantunan, keagamaan dan kebudayaan;
2. Membangun ekonomi berbasis gotong royong sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan yang menjangkau semua lapisan serta mendorong keberpihakan terhadap sektor ekonomi kecil dan menengah yang sinergi dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar;
3. **Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatif sehingga terwujud kebijakan yang inklusif di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik, inovatif, tegas dan mengayomi;**
4. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinnekaan;
5. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

RB



VISI DAN MISI PRESIDEN RI 2020-2024



Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia



Terwujudnya Indonesia Maju Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



K. H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia



- 1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;**
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6. **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermatrabat dan Terpercaya;**
- 7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga;
- 8. **Pengelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;**
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

JALAN PERUBAHAN II

NAWA CITA

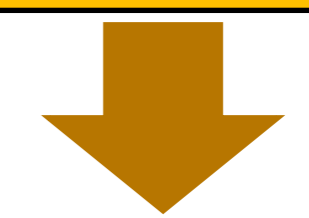


RPJMN 2015-2019

RPJMN 2020-2024

RPJMD JATIM 2019-2024

RPJMD BWS 2018-2023



**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BONDOWOSO
2018-2023**



AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

4TH

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU



1 MENTAL APARATUR DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel



2 PENGAWASAN

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN



3 AKUNTABILITAS

Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi



4 KELEMBAGAAN

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

8 AREA PERUBAHAN

TATALAKSANA

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip *good governance*

5



SDM ASN

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera

6



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.

7



PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

8



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PROV JATIM DAN KAB/KOTA SE JATIM TAHUN 2018



Jawa Timur 72.81 BB

1	Kab. Pacitan	58.65	CC
2	Kab. Trenggalek	65.04	B
3	Kab. Tulungagung	63.57	B
4	Kab. Kediri	57.98	CC
5	Kab. Malang	65.79	B
6	Kab. Jember	50.16	CC
7	Kab. Banyuwangi	74.76	BB
8	Kab. Bondowoso	63.27	B
9	Kab. Situbondo	61.76	B
10	Kab. Probolinggo	61.76	B
11	Kab. Pasuruan	60.02	B
12	Kab. Sidoarjo	65.58	B
13	Kab. Mojokerto	57.68	CC
14	Kab. Nganjuk	52.10	CC
15	Kab. Madiun	53.17	CC
16	Kab. Ngawi	62.34	B
17	Kab. Bojonegoro	55.33	CC
18	Kab. Tuban	52.65	CC
19	Kab. Lamongan	63.22	B
20	Kab. Gresik	63.30	B
21	Kab. Pamekasan	55.09	CC
22	Kab. Sumenep	55.29	CC
23	Kota Blitar	60.69	B
24	Kota Malang	68.05	B
25	Kota Probolinggo	60.71	B
26	Kota Pasuruan	60.02	B
27	Kota Mojokerto	56.89	CC
28	Kota Madiun	61.65	B
29	Kota Surabaya	73.39	BB
30	Kota Batu	55.06	CC



Sumber : KemenPAN dan RB



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



TUJUAN REFORMASI BIROKRASI



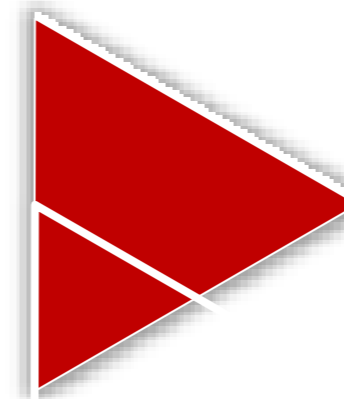
Pola Pikir



Budaya Kerja



Profil dan Perilaku
ASN
KABUPATEN
BONDOWOSO



PERBUB 40/2016
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso



**TERWUJUDNYA BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO YANG
INTEGRITAS, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL
(I.P.A.)**





TIGA KUNCI SUKSES PPRB PEMDA



GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, SEKDA, ASISTEN DAERAH I, II, III DAN PARA PEJABAT ESELON II, ESELON III DAN ESELON IV PROVINSI JAWA TIMUR

1. KOMITMEN PIMPINAN

BUPATI/WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN DAERAH I, II, III DAN PARA PEJABAT ESELON II, ESELON III DAN ESELON IV KABUPATEN BONDOWOSO

3. MOTOR PENGGERAK
(Keterlibatan secara aktif semua anggota Tim Pelaksana, *Agent of Change* dan Tim Budaya Kerja)

2. PEDOMAN PELAKSANAAN
(*Roadmap RB Pemda dan Action Plan RB PD*)



© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA PRIORITAS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TAHAP II (2015-2019)



Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- Opini BPK atas Laporan Keuangan : **WTP**;
- Tingkat Kapabilitas APIP: **Level 3**;
- Tingkat Kematangan Implementasi SPIP: **Level 3**;
- Instansi Pemerintah yang Akuntabel: **LHE AKIP B, BB – A**;
- Penggunaan *e-Procurement* terhadap PBJ: **SPSE**;
- LHKPN dan LHKASN: **100%**

Birokrasi yang Efektif dan Efisien

- Indeks Profesionalitas ASN : **80**;
- Indeks Kearsipan : **BAIK**;
- Indeks *e-Government* : **3,5 = BAIK**;
- Indeks Keterbukaan Informasi Publik: **75**;

Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas

- Indeks Integritas Organisasi : **3,5**;
- Indeks Persepsi Anti Korupsi: **3,6**;
- Indeks Kualitas Pelayanan Publik: **3,5**;
- Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik: **GREEN AREA**





AGENDA PRIORITAS ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI NASIONAL TAHAP III (2020-2024)



Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi
- Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
- Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparial
- Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
- Meningkatnya *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan
- Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan

Birokrasi yang Kapabel

- Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
- Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
- Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

Birokrasi yang Menciptakan Pelayanan Publik yang Prima

- Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik.
- Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



TARGET REFORMASI BIROKRASI 2018-2023 KABUPATEN BONDOWOSO



**OPD WAJIB RB ADALAH
OPD PELAYANAN DASAR**

OPD BIDANG PENDIDIKAN

OPD BIDANG KESEHATAN

OPD BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

OPD BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

OPD BIDANG TRANTIBUM LINMAS

OPD BIDANG SOSIAL

**10 PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PERANGKAT
DAERAH LAIN
YANG
DITENTUKAN
OLEH
INSPEKTORAT
DAERAH DAN
BAGIAN
ORGANISASI**

**KABUPATEN
BONDOWOSO**

DENGAN 8 POKJA

**ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
KAB. BONDOWOSO**



**RENCANA AKSI / ACTION PLAN
REFORMASI BIROKRASI
10 OPD TERPILIH**



© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Regulasi

1 SE MDN NO 061/9454/SJ
Tanggal 29 Desember 2017

“PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”



PPRB PEMDA

PPRB PEMDA

2 SE MDN NO 061/191/SJ
Tanggal 11 Januari 2018

“FASILITASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”



3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA





SOSIALISASI DAN INTERNALISASI RB PEMDA



TUGAS BIRO ORGANISASI PROVINSI/ BAGIAN ORGANISASI KAB/KOTA



**PENYUSUNAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH**



**PENYELENGGARAAN RAPAT
KOORDINASI REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH**



**PENYUSUNAN RENCANA
AKSI (*ACTION PLAN*)
REFORMASI BIROKRASI DI
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**



**PEMBINAAN DAN
INTERNALISASI REFORMASI
BIROKRASI DI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH**

© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



MONITORING DAN EVALUASI PPRB PEMDA



TUGAS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI/ INSPEKTORAT DAERAH KAB/KOTA



Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah



Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Setiap Triwulan



Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb




www.rb.kemendagri.go.id



PENGANGGARAN RB PEMDA TAHUN 2020



SALINAN


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



- 131 -

f. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi:

- 1) Delapan Area Perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, penguatan dan penataan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah, antara lain melalui penyelenggaraan rapat koordinasi pusat-daerah; dan
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020

Penganggaran RB pada Pemerintah Daerah dianggarkan BIRO ORGANISASI pada SETDA PROVINSI dan Bagian Organisasi pada SETDA KAB/KOTA dan Pada Masing-Masing OPD berdasar tugas dan fungsinya yang BERSESUAIAN dengan 8 AREA PERUBAHAN; DAN PENGANGGARAN EVALUASI INTERNAL RB PEMDA PADA INSPEKTORAT DAERAH pada Romawi V Angka 54.





AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



1

INDEKS = 5



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



Harmonisasi



Sistem Pengendalian Penyusunan PUU

2

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

INDEKS = 5



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



3

Evaluasi Kelembagaan

Penataan Kelembagaan

Penataan dan Penguatan Organisasi

INDEKS = 6



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



4

Proses
Bisnis dan
SOP

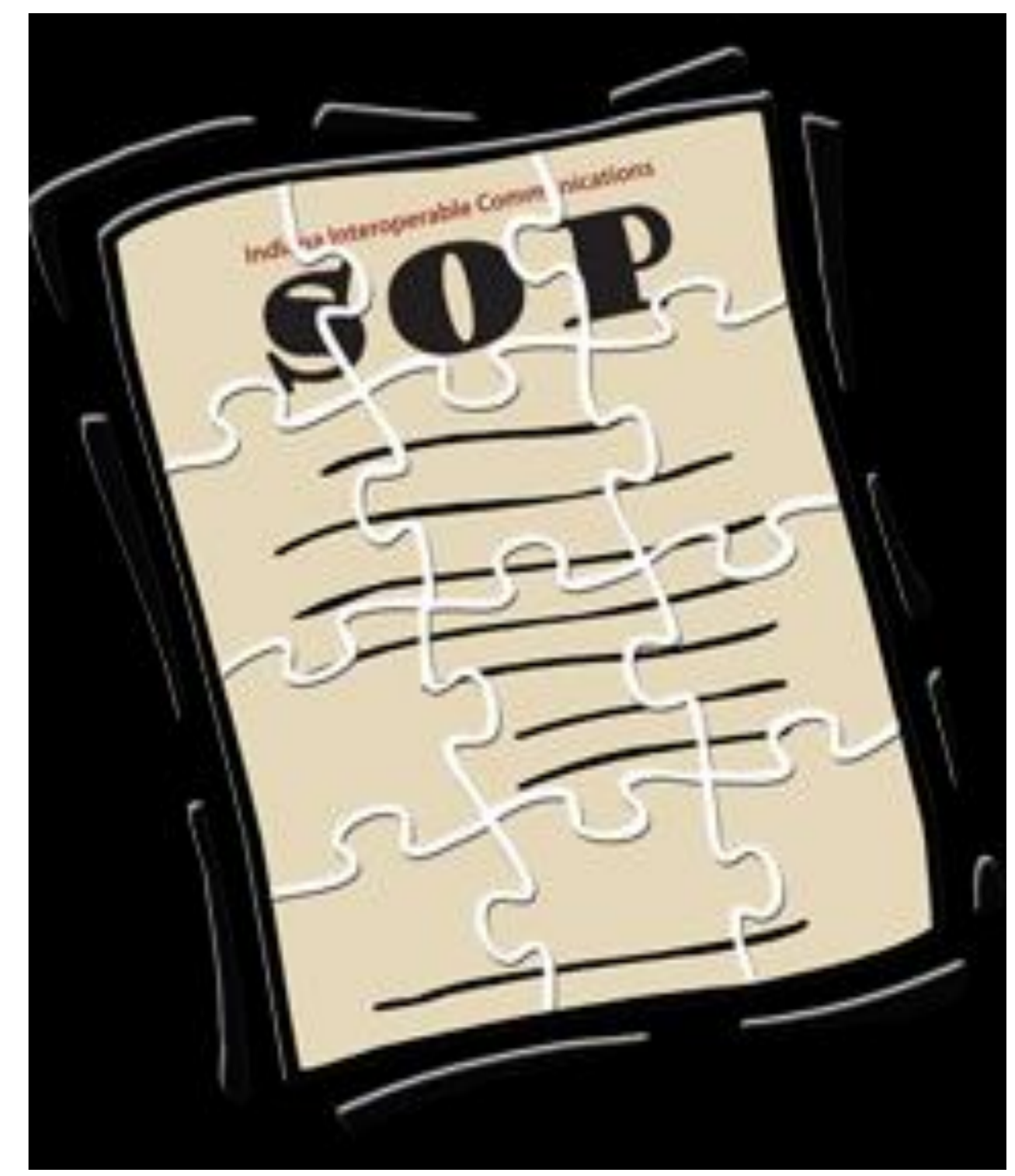
E-Gov

Keterbukaan
Informasi
Publik

Tata Naskah
Dinas

Penataan
Tatalaksana

INDEKS = 5



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id

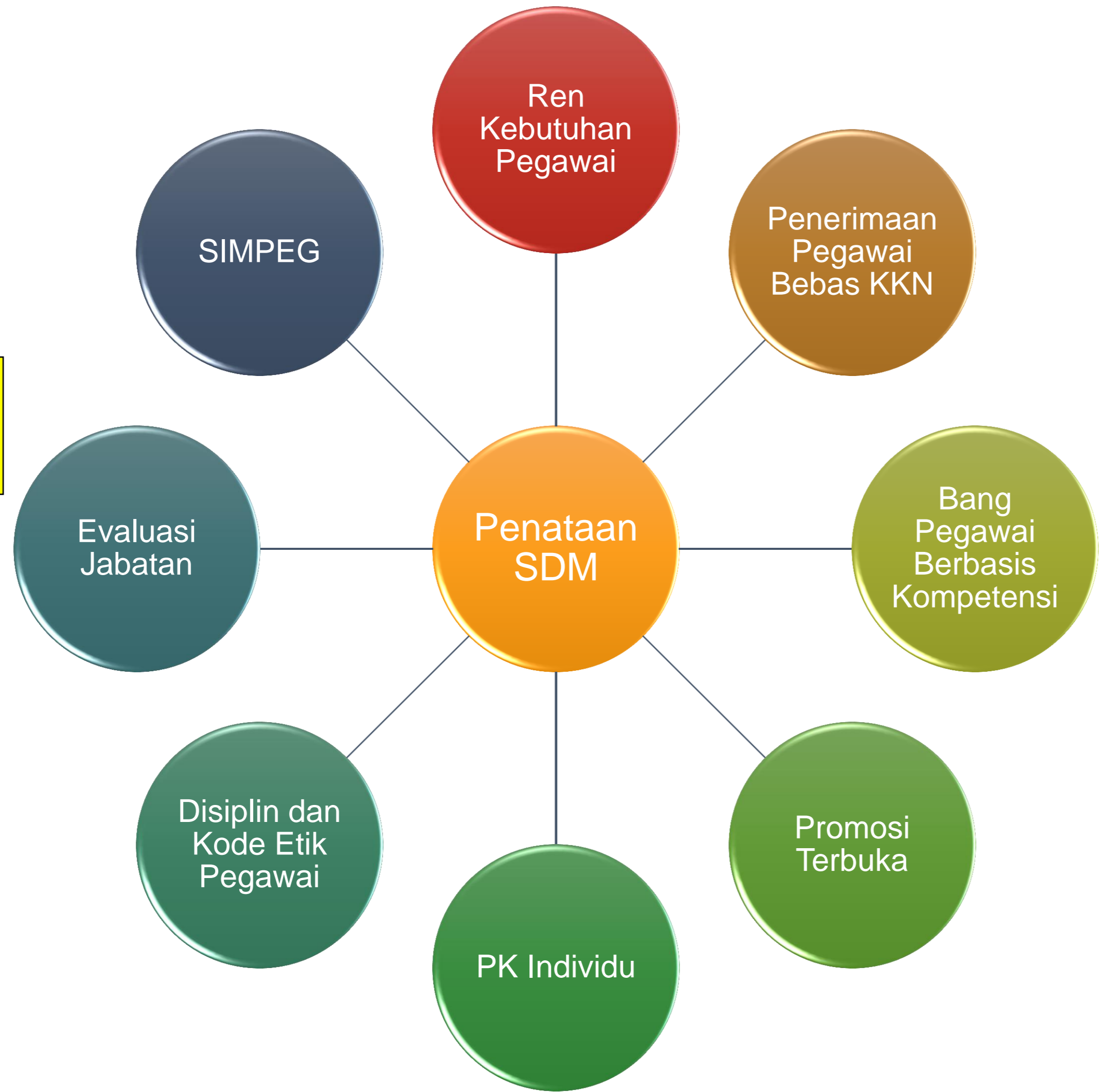


AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



5

INDEKS = 15



@kemendagriRb



KemendagriRb



@kemendagriRb



www.rb.kemendagri.go.id

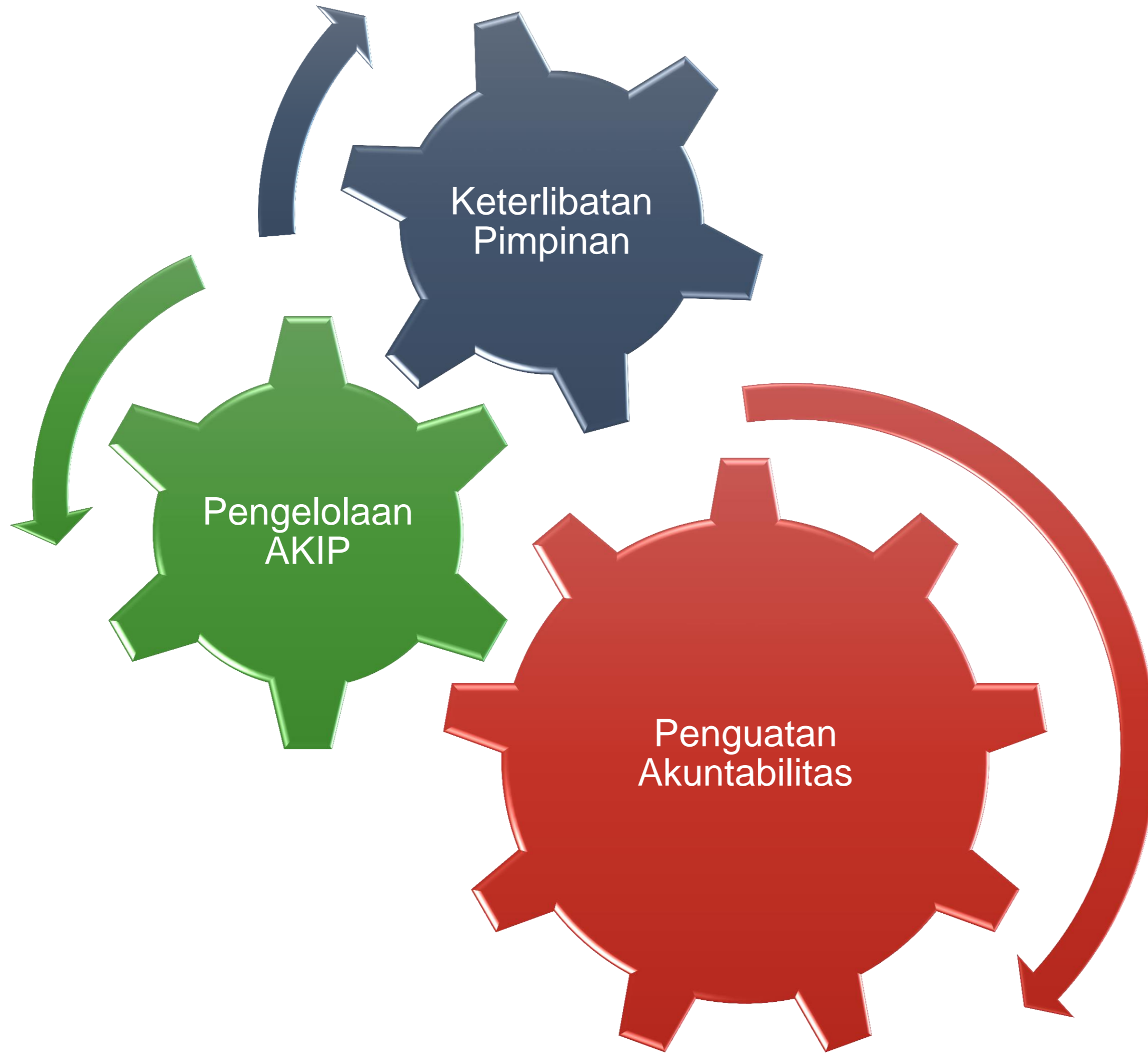


AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



6

INDEKS = 6



culpability
ANSWERABLE
LIABILITY
ownership
ACCOUNTABILITY
duty obligation
reliable
responsibility
COMMITMENT



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



7

INDEKS = 12



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id

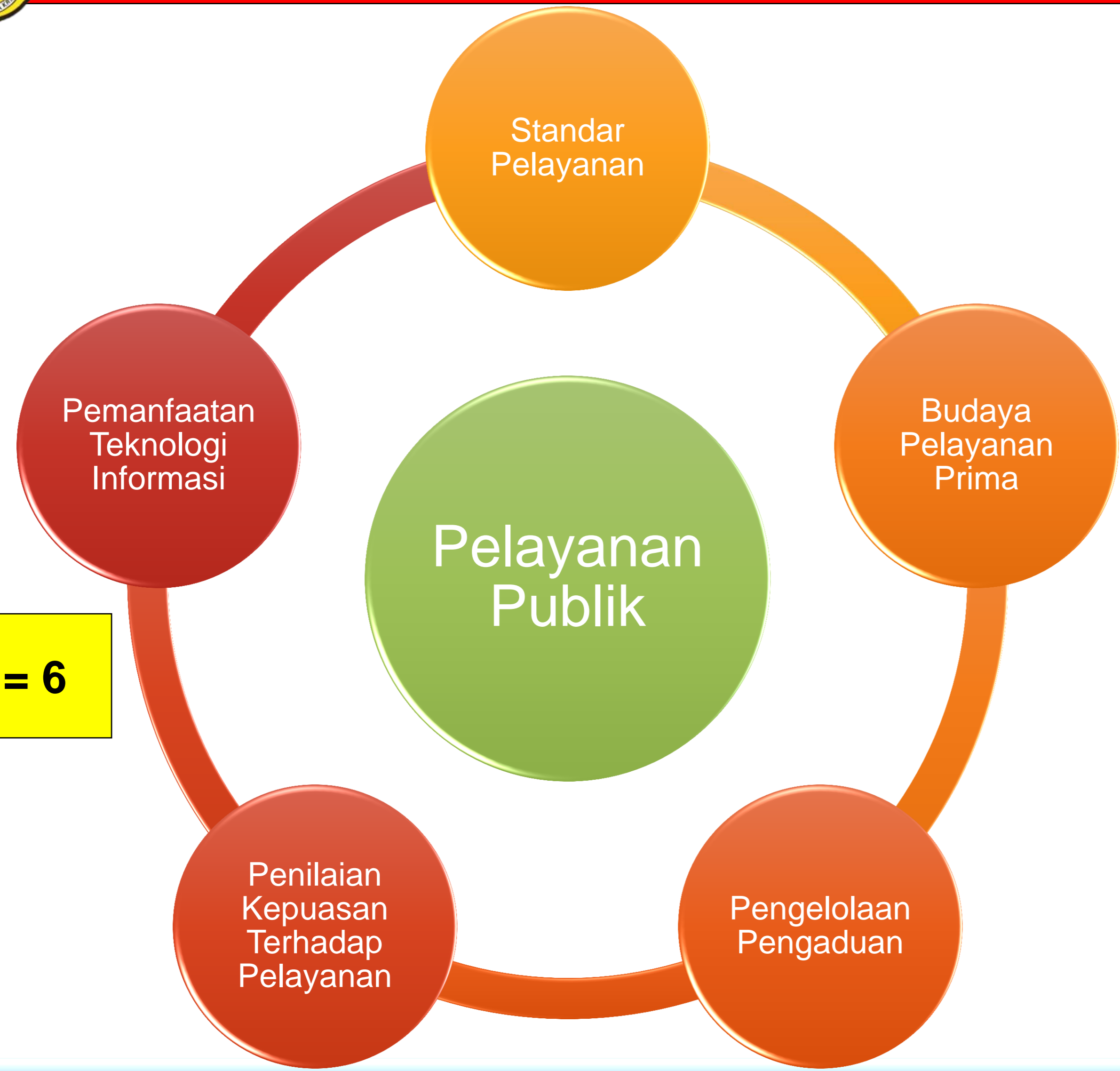


AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



8

INDEKS = 6



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN HASIL)



I.	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	20,00
	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00
	2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal)	6,00
II.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	10,00
	1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	7,00
	2. Opini BPK	3,00
III.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00
	1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	10,00

**TOTAL
INDEKS =
40**



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



SIMPULAN ATAS PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI



No	Kategori	Indeks	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan,
2	A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



B. BINWAS PEMDA



@kemendagrirb



KemendagriRb



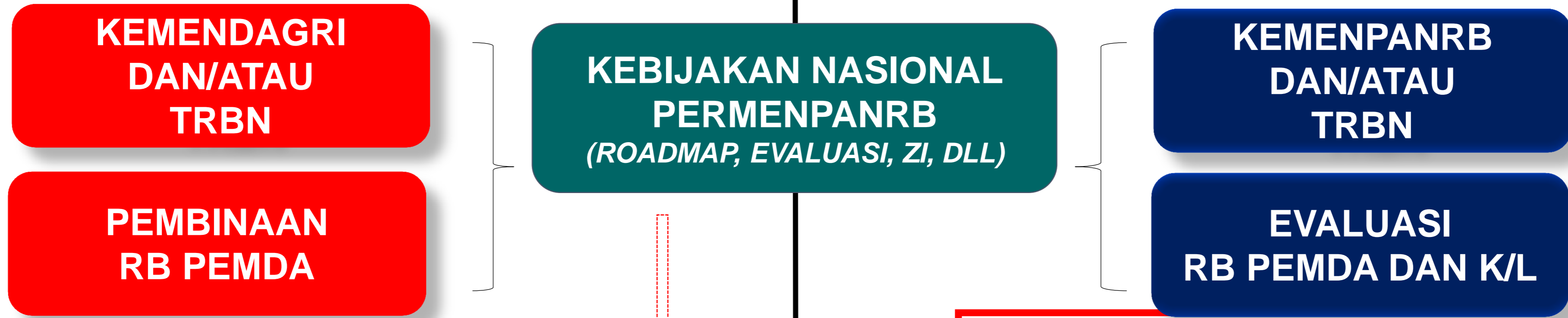
@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



SINERGITAS KEMENDAGRI DAN KEMENPANRB DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH



**PERMENDAGRI 135/2018
PPRB PEMDA**

**34 PROVINSI DAN
514 KAB/KOTA**

**34 KEMENTERIAN
DAN 79 LPNK**

© Bagian RB Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



PEMDA YANG TELAH MELAKSANAKAN RB



TAHUN 2017

34 PROVINSI (100 %)

107 KAB/KOTA (20,81%)

Pembinaan
oleh Kemendagri Periode
Januari s.d. Oktober 2018

TAHUN 2018

34 PROVINSI (100 %)

208 KAB/KOTA (40,46%)

Masih terdapat 306 Kab/Kota yang belum mengimplementasikan program Reformasi Birokrasi, minimal dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



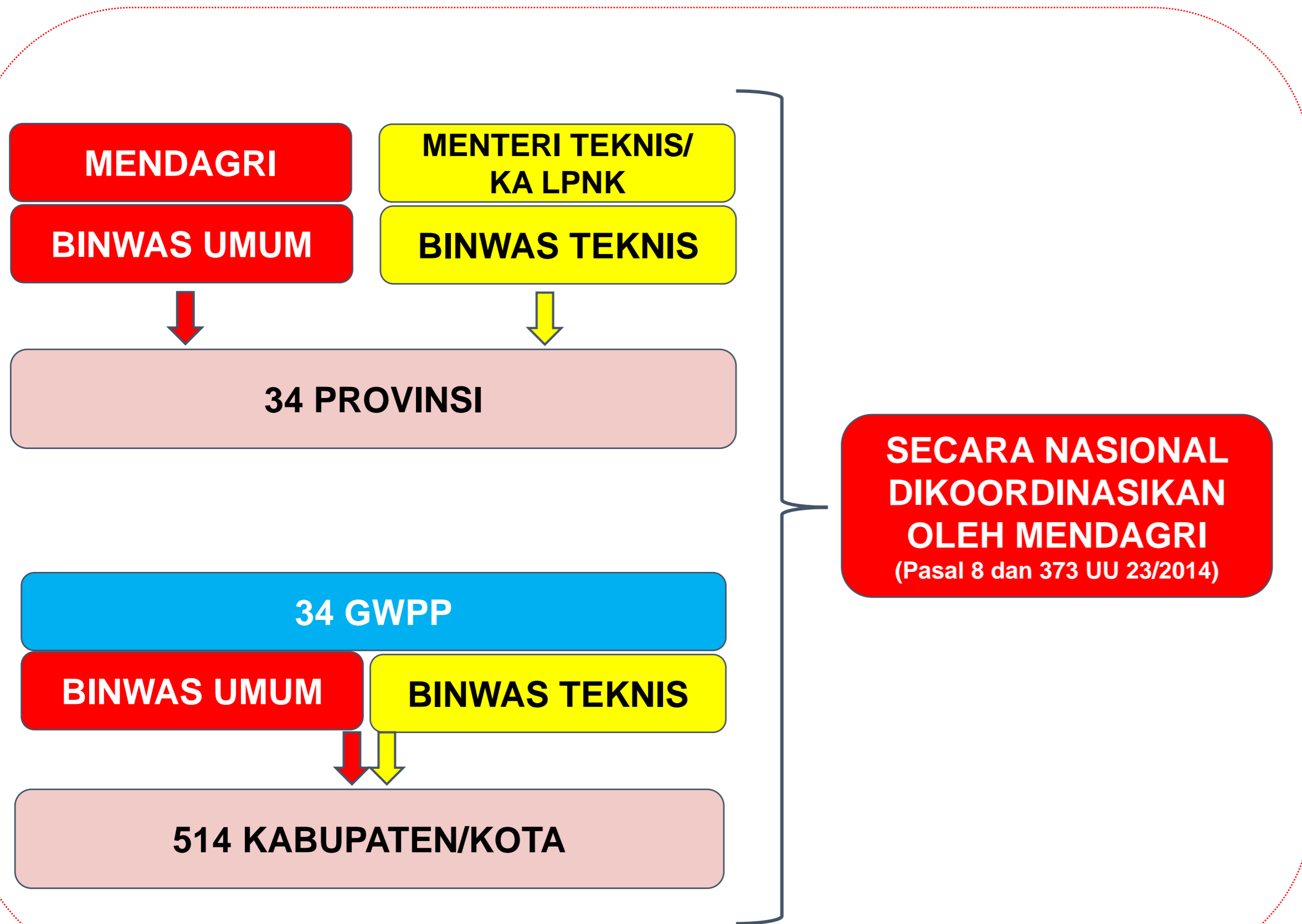
www.rb.kemendagri.go.id



PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN



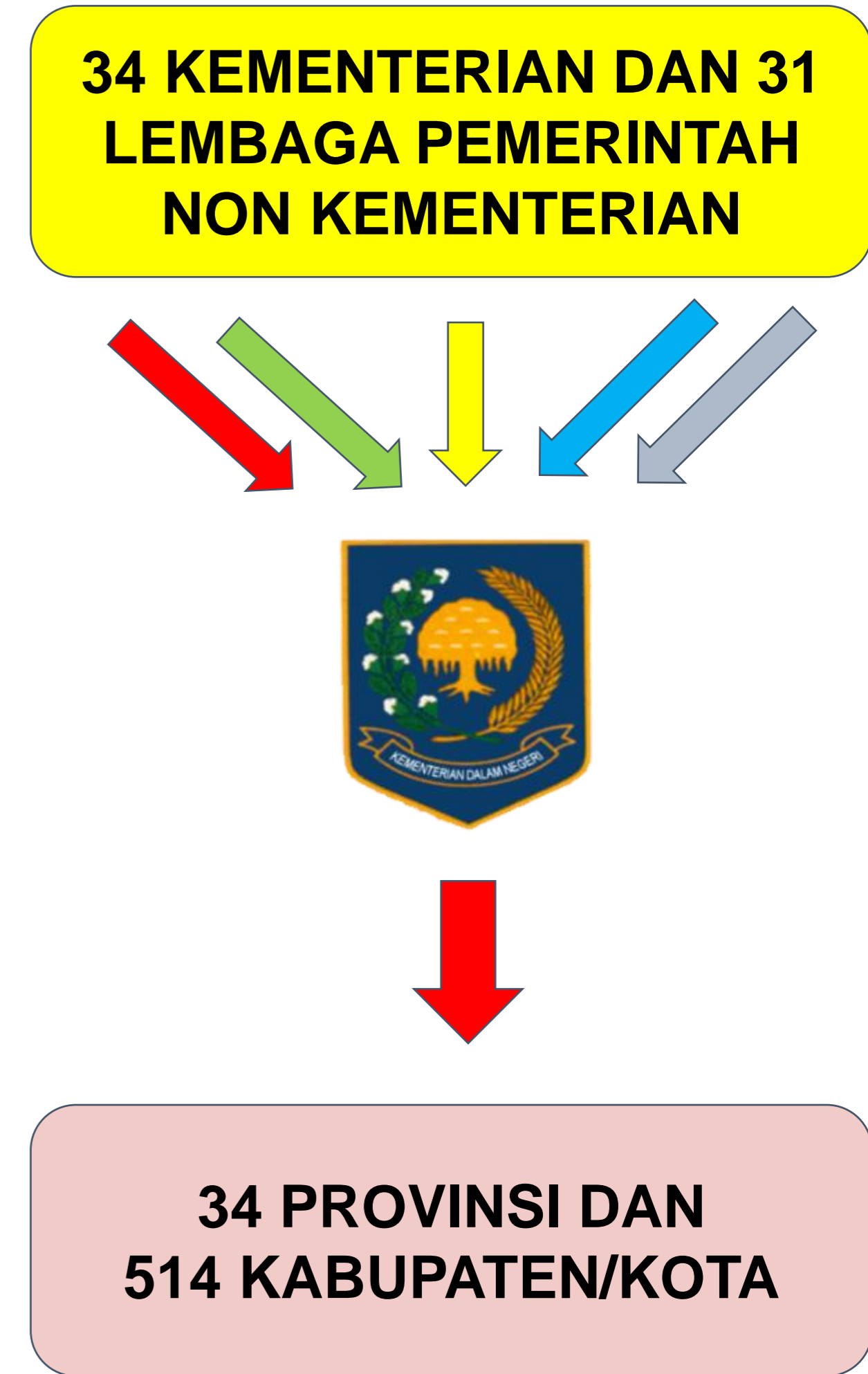
REGULASI SAAT INI



KENYATAAN



HARAPAN



© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



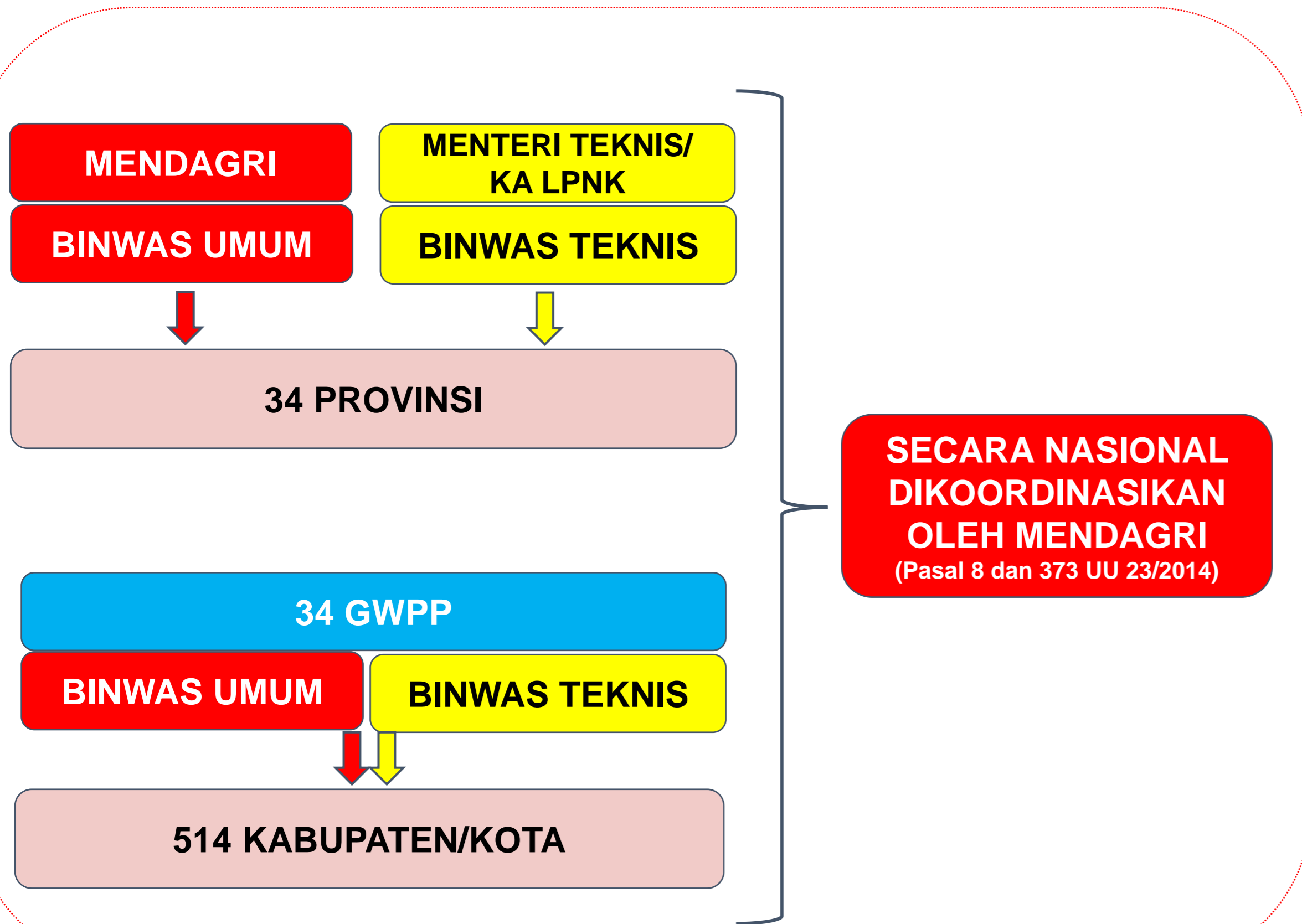
www.rb.kemendagri.go.id



PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN



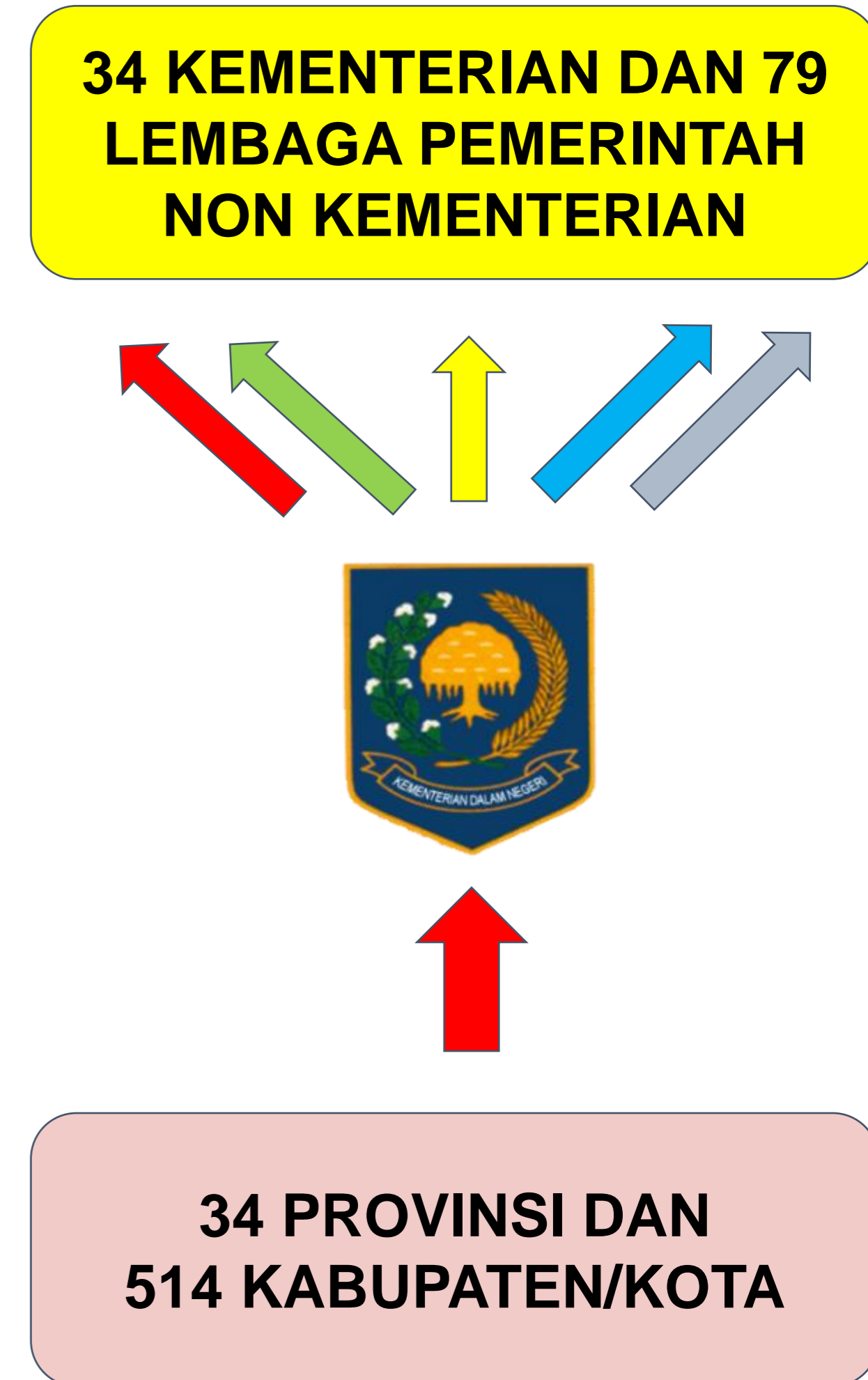
REGULASI SAAT INI



KENYATAAN



HARAPAN



© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb

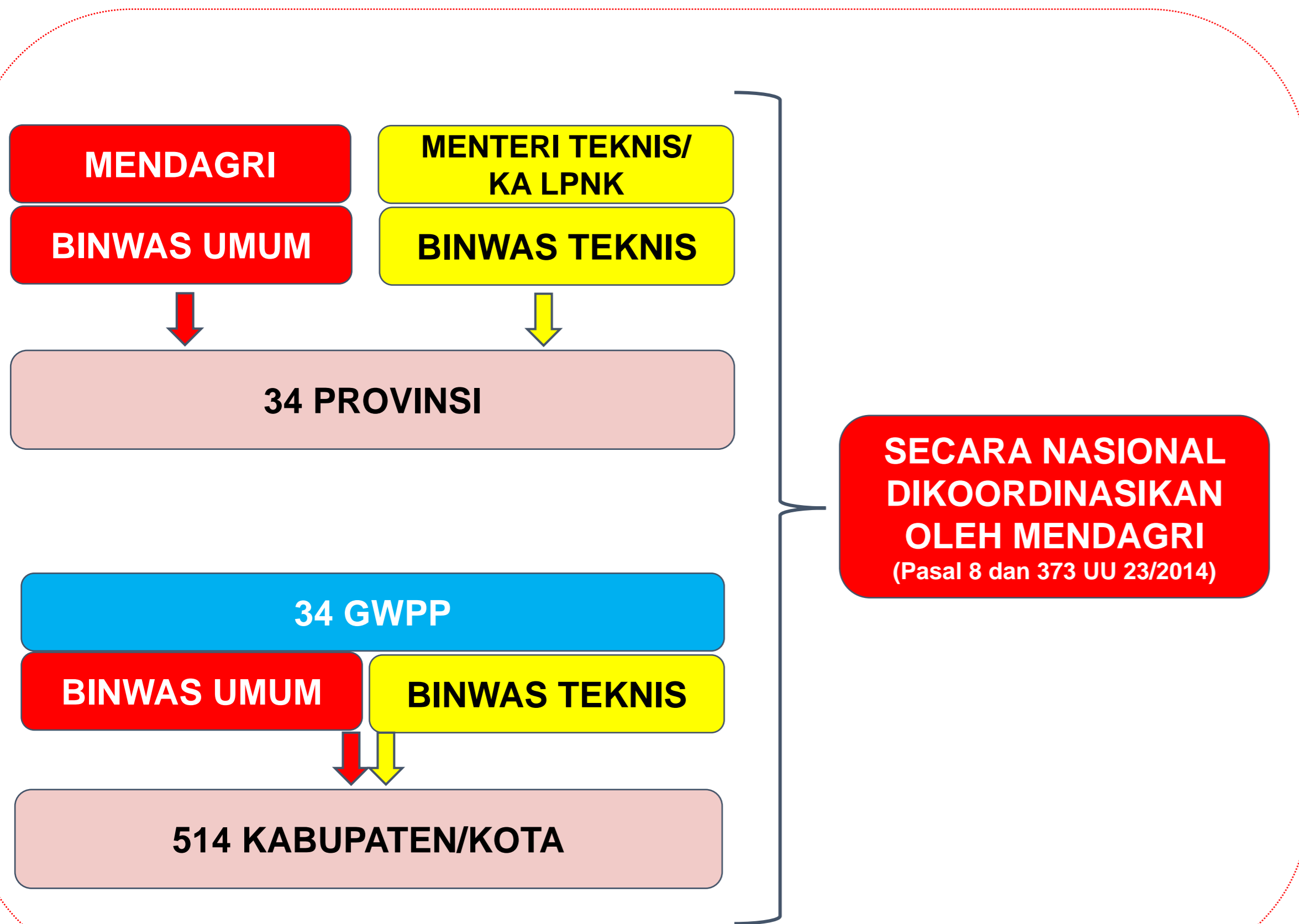


www.rb.kemendagri.go.id



PLATFORM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DI HARAPKAN

REGULASI SAAT INI



BINWAS UMUM

KEMENDAGRI

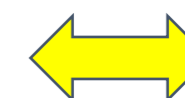
1. Pembagian Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan Daerah;
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
4. Keuangan Daerah;
5. Pembangunan Daerah;
6. Pelayanan Publik di Daerah;
7. Kerja Sama Daerah;
8. Kebijakan Daerah;
9. Kepala Daerah dan DPRD; dan
10. Pembinaan dan Pengawasan Lain Sesuai dengan Ketentuan PUU.

34 PROVINSI

BINWAS TEKNIS

34 KEMENTERIAN DAN 31
LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN

32 URUSAN PEMERINTAHAN



34 PROVINSI





IRISAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN



LEVEL PEMERINTAHAN PUSAT

PRESIDEN

34 MENTERI DAN 31 KEPALA LPNK

Korbinwas Pemda

IRISAN TUSI KEMENDAGRI DAN K/L

K/L

KEMENDAGRI

1. Kemenpanrb, Kominfo, Kemenkumham, dLL;
2. BPIP dan Kemenkumham, dLL;
3. BNPB dan BNPP;
4. Kemenpanrb, Kemenkumham, BKN, KASN;
5. Bappenas;
6. Kemendes;
7. Kemenkeu;
8. BKKBN;
9. BPKP;
10. LIPI dan Kemenristek Dikti;
11. LAN;

1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan;
4. Ditjen Otonomi Daerah;
5. Ditjen Bina Pembangunan Daerah;
6. Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
7. Ditjen Bina Keuangan Daerah;
8. Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan;
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Koordinasi

MENDAGRI

LEVEL PEMERINTAHAN DAERAH

Binwas Teknis

Binwas Umum

34 PROVINSI

34 GWPP

Binwas Umum dan Teknis

514 KABUPATEN/KOTA

© Biro Ortala Setjen KDN, 2019



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



C. OPERASIONALISASI 8 AREA PERUBAHAN



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



1

MANAJEMEN PERUBAHAN		5,00
1	<p>Tim Reformasi Birokrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemda setiap tahun; dan b. Tim Reformasi Birokrasi Pemda telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja internal (F10K), dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. 	1,00
2	<p>Road Map Reformasi Birokrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan <i>Road Map</i> RB Pemda mencakup 8 area perubahan dan <i>quick win</i> yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; b. Penyusunan <i>Road Map</i> RB Pemda melibatkan seluruh unit organisasi; dan c. Sosialisasi dan internalisasi <i>Road Map</i> RB Pemda kepada anggota organisasi. 	1,00
3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Setda dan Inspektorat)	2,00
4	<p>Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan Pimpinan Daerah/Sekda dan Ka. OPD secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan; c. Pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model RB</i>; dan d. Pembentukan Tim Budaya Kerja Level Pemda dan Level OPD. 	1,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



2

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		5,00
1	<p>Harmonisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi Qanun/Perda dan Perkada yang tidak harmonis/tidak sinkron; b. Menganalisis Qanun/Perda dan Perkada yang tidak harmonis/tidak sinkron; c. Melakukan pemetaan Qanun/Perda dan Perkada yang tidak harmonis / tidak sinkron; dan d. Merevisi Qanun/Perda dan Perkada yang tidak harmonis/tidak sinkron. 	2,50
2	<p>Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya rapat koordinasi; b. Adanya naskah akademis/ kajian / <i>policy paper</i>; c. Adanya paraf koordinasi; dan d. Adanya evaluasi. 	2,50



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



3

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		6,00
1.	<p>Evaluasi:</p> <p>Dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi; b. mengukur jenjang organisasi; c. menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi; d. menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok; e. menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan; f. menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan; g. kesesuaian struktur organisasi dengan mandat; h. menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain; i. menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; 	3,00
2.	<p>Penataan</p> <p>Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi.</p>	3,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



4

PENATAAN TATALAKSANA		5,00
1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama: <ol style="list-style-type: none"> Memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi; Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP); Penerapan SOP; dan Peta proses bisnis dan SOP dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi. 	1,25
2	<i>E-Government:</i> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki rencana pengembangan <i>e-gov</i>; Dilakukan pengembangan <i>e-gov</i> dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem <i>database</i> SDM, dll); dan Dilakukan pengembangan <i>e-gov</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: <i>website</i> dan sistem pengaduan). 	1,50
3	Keterbukaan Informasi Publik: <ol style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan daerah tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian); Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 	1,25
4	Kualitas Pengelolaan Arsip (Tata Naskah Dinas dan Kearsipan)	1,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



5

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		15,00
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan; b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan; c. Rencana distribusi pegawai telah disusun dan diformalkan; d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan; dan e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan.	1,00
2	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN	2,00
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi: a. Telah ada standar kompetensi jabatan; b. Telah dilakukan <i>asesment</i> jabatan; c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi; d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi; e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi; dan f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangn pegawai berbasis kompetensi secara berkala.	1,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



5

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		15,00
4	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka	6,00
5	Penetapan Kinerja Individu: <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat penetapan kinerja individu; b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu di level atasnya; d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik; e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu; f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu; dan g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja. 	2,00
6	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai: <ul style="list-style-type: none"> a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah ditetapkan; b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah diimplementasikan; c. Adanya monitoring evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku; dan d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward and punishment</i>). 	1,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



5

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		15,00
7	<p>Pelaksanaan Evaluasi Jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi faktor jabatan telah disusun; b. Peta jabatan telah ditetapkan; dan c. Kelas jabatan telah ditetapkan. 	1,00
8	<p>Sistem Informasi Kepegawaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan; b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai; c. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan; dan d. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM. 	1,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



6

PENGUATAN AKUNTABILITAS		6,00
1	<p>Keterlibatan Pimpinan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Renstra; b. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja; dan c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 	2,00
2	<p>Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; b. Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja; c. Sistem pengukuran kinerja telah dirancang berbasis elektronik; d. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit; dan e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala. 	4,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



7

PENGUATAN PENGAWASAN		12,00
1	<p>Gratifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi; b. Telah dilakukan <i>public campaign</i>; c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan; d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi; e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti; dan f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. 	1,50
2	<p>Penerapan SPIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP; b. Telah dibangun lingkungan pengendalian; c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi; d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern; dan g. Level maturitas SPI. 	1,50



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



7

PENGUATAN PENGAWASAN		12,00
3	<p>Pengaduan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat; b. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan; c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti; d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti; dan f. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti. 	2,00
4	<p><i>Whistle-Blowing System:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat kebijakan <i>whistle-blowing system</i>; b. <i>whistle-blowing system</i> telah disosialisasikan; c. <i>whistle-blowing system</i> telah diimplementasikan; d. Telah dilakukan evaluasi atas <i>whistle-blowing system</i>; dan e. Hasil evaluasi atas <i>whistle-blowing system</i> telah ditindaklanjuti. 	1,50
5	<p>Penanganan Benturan Kepentingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat kebijakan penanganan benturan kepentingan; b. Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan; c. Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan; d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan e. Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti. 	1,50



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



7

PENGUATAN PENGAWASAN		12,00
6	<p>Pembangunan Zona Integritas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. telah dilakukan pencaanangan zona integritas;b. telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas;c. telah dilakukan pembangunan zona integritas;d. telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan; dane. telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”.	2,50
7	<p>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – KHUSUS INSPEKTORAT:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan;b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas;c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai;d. APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko; dane. Indeks Internal Audit Capability Model (IACM).	1,50



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



8

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		6,00
1	<p>Standar Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat kebijakan standar pelayanan; b. Standar pelayanan telah dimaklumkan; c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan; d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan; dan e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP. 	1,00
2	<p>Budaya Pelayanan Prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, <i>capacity building</i>, pelayanan prima); b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. Telah terdapat sistem <i>reward/ punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi; dan e. Terdapat inovasi pelayanan. 	1,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



AGENDA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019 (KOMPONEN PENGUNGKIT/PROSES)



8

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		6,00
3	<p>Pengelolaan Pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat media pengaduan layanan; b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan; c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan; d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; dan e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan. 	1,50
4	<p>Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakuakn survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan c. Dilakukan tindak lanjut atas hasl survey kepuasan masyarakat. 	1,50
5	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian layanan; b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; dan c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus. 	1,00



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb



www.rb.kemendagri.go.id



D. RANCANGAN ROADMAP RB



@kemendagrirb



KemendagriRb



@kemendagrirb

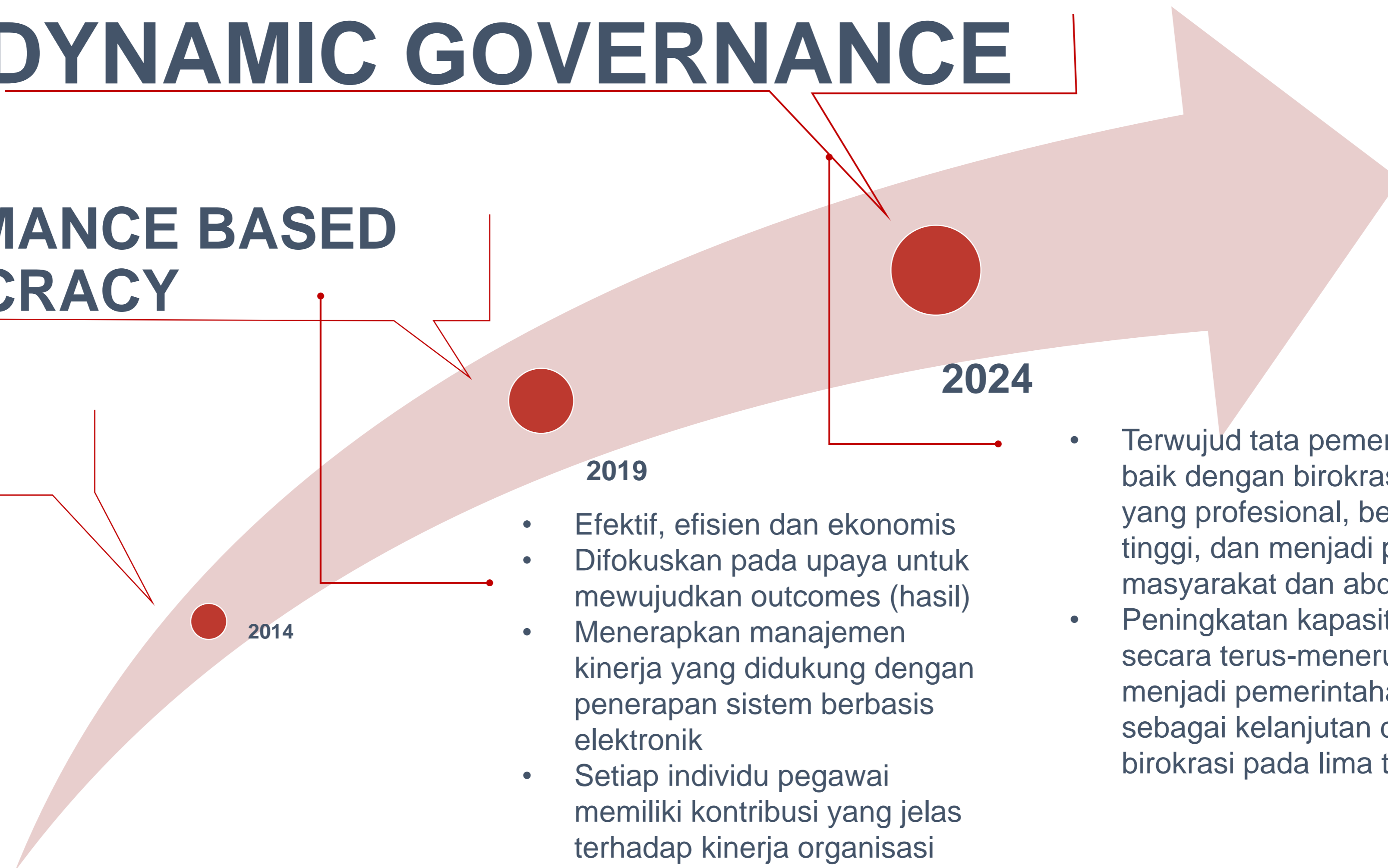


www.rb.kemendagri.go.id

DYNAMIC GOVERNANCE

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

RULE BASED BUREAUCRACY



- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

- Terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
- Peningkatan kapasitas birokrasi secara terus-menerus untuk menjadi pemerintahan kelas dunia sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua



01

Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel

Terdiri dari 6 Sasaran:

1. Menguatnya integritas dan budaya anti korupsi dalam birokrasi
 - Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN) - Minimal XX
 - Survey persepsi anti korupsi - Minimal 4 dari skala 5
2. Terciptanya pengawasan yang independent, professional dan sinergis
 - Indeks Kapabilitas APIP - Minimal 3
 - Indeks Maturitas SPIP - Minimal 3
3. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan inparsial
 - Indeks Netralitas ASN - Minimal level 3
4. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
 - % (Presentase) K/L/P yang telah menerapkan e-performance based budgeting
 - Nilai SAKIP - Minimal B
 - Opini BPK - Minimal XX
 - Governement effectiveness Index - Minimal XX
 - Indeks Efisiensi Pemerintahan
5. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme dan non-diskriminatif dalam system pemerintahan
 - Indeks Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa - Minimal level 3
 - Indeks keterbukaan publik - Minimal XX
 - Open Government Index - Minimal XX
6. Terhujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - Indeks Reformasi Hukum - Minimal Level 3
 - Rule of Law Index - Minimal XX



02

Birokrasi Yang Kapabel

1. Tertatanya instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi
 - Indeks Kelembagaan - Minimal 60
2. Terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - Indeks SPBE - Minimal Level 3
 - Indeks Kearsipan - Minimal Predikat Baik
 - Indeks Tata Laksana - Minimal XX
3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis system merit
 - Indeks Profesionalitas ASN - Minimal Level 3
 - Indeks Merit System - Minimal Level 3
 - Indeks Risk Mitigation Capability - Minimal Level 3
4. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi
 - Indeks Kepemimpinan Perubahan - Minimal Level 3 (LAN)

03

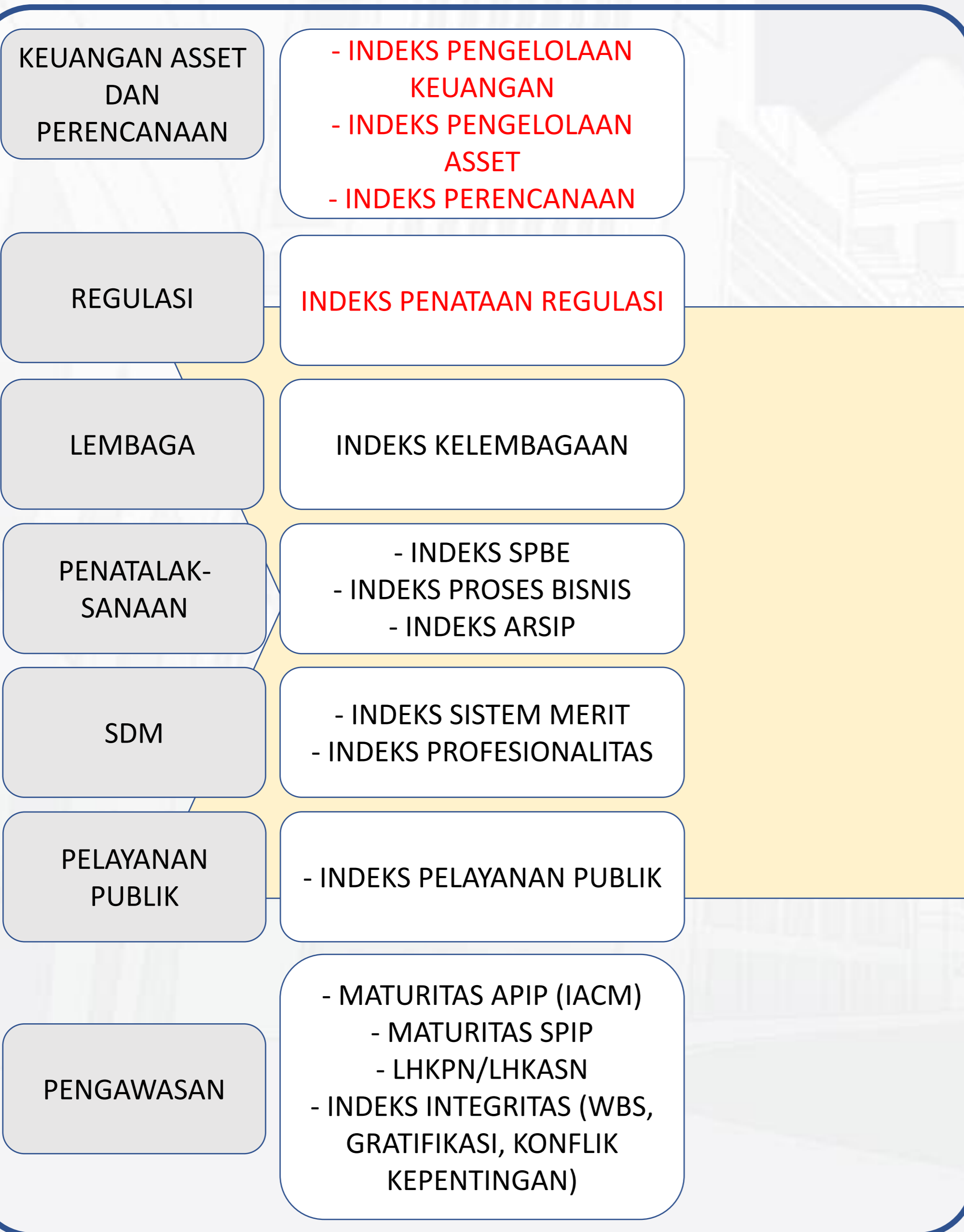
Pelayanan Publik Yang Prima

1. Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik
 - Indeks Inovasi - Minimal XX
2. Menguatnya pelayanan publik yang responsive dan berdaya saing
 - Public Services Index - Minimal XX (kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, integritas)



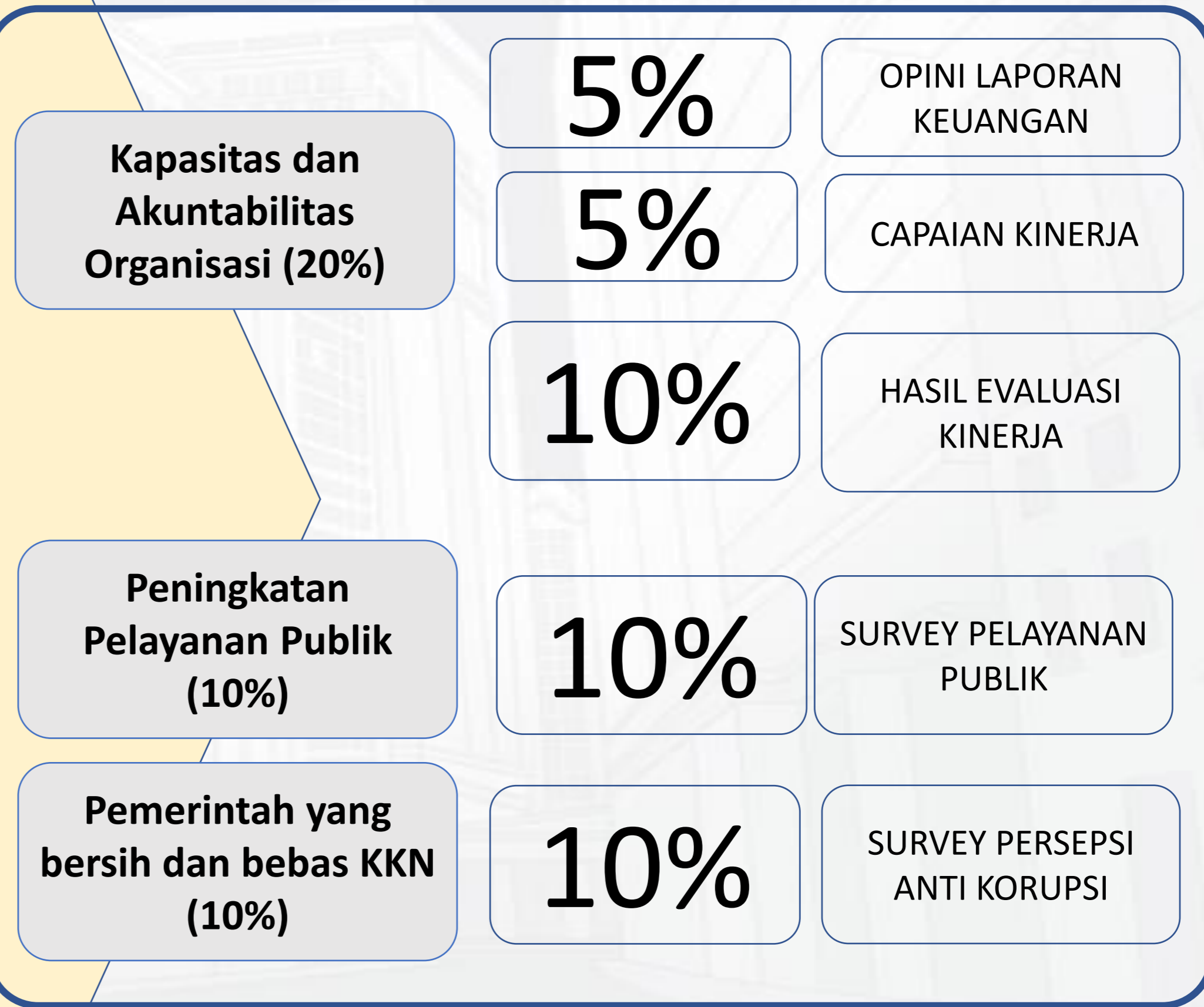


PENGUNGKIT



PMPRB 4.0 = 2020-2024

HASIL REFORMASI BIROKRASI



60%

40%



OUTLINE PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024



BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Ruang Lingkup

BAB II KONDISI SAAT INI

- A. Gambaran Umum
- B. Kondisi Aktual
- C. Identifikasi Permasalahan

BAB III KONDISI YANG DIHARAPKAN

- A. Fokus Perubahan
- B. Agenda Prioritas Program/Kegiatan dan *Quick Wins*
- C. Indikator Keberhasilan
- D. Elemen Pendukung
- E. Monitoring dan Evaluasi

BAB IV PENUTUP





Reformasi Birokrasi Sekarang dan Kedepan



	Sekarang	Kedepan
01 Orientasi	Formalitas	Hasil
02 Ruang Lingkup	Instansi (K/L/P)	Instansi & Unit (K/L/P)+Unit
03 Leading Sector	Kemenpan RB	Melibatkan Banyak Instansi

Kemenpanrb, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas dan Kemenkopohukam



Thank You!



SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE (CTO) RB KEMENDAGRI

BAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat

HP: 0812 2040 8866 - e-mail: RB-Kemendagri@gmail.com

Website: <http://www.rb.kemendagri.go.id>



Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia 2019